

## BAB IV

### KONKRETISASI MAKNA

#### *NASKAH Opera Sembelit – Mimpi Jadi Nyeri*

Dalam bab tiga telah dikemukakan, suatu penafsiran karya sastra sebagai diskursus yang melibatkan hubungan makna suatu unsur struktur OS-MJN yang menjadi elemen kode bahasa dengan makna yang terdapat dalam konteks. Prosedur yang menghubungkan kedua makna tersebut diperlukan agar menghasilkan dan menerima diskursus sehingga kemampuan untuk menggunakan dan memaknai bahasa sebagai komunikasi secara umum dapat menjadi landasan bagi pemahaman naskah OS-MJN secara khusus.

Pada bagian bab ini akan dibicarakan konkretisasi makna, yang dibedakan dengan pemaknaan pada bab tiga. Kalau dalam bab tiga menganalisis makna yang terkandung dalam unsur-unsur struktur naskah OS-MJN sebagai elemen kode, dan makna yang dinyatakan oleh unsur-unsur strukturnya yang muncul dalam konteks pemakaian. Dalam bab ini tidak lagi menggunakan istilah perlambangan (*signification*) untuk mengacu pada jenis makna yang pertama, tetapi menggunakan istilah *nilai* untuk mengacu pada jenis makna kedua.

Menurut pendapat Widdowson (1997: 63), penulis karya sastra dalam karakterisasi komunikasi sastra memainkan peran sosial, tetapi tidak langsung. Mungkin setelah membaca proses pemaknaan pertama naskah OS-MJN, orang akan

mengatakan bahwa N.Riantiarno mempunyai tujuan sosial: mengubah perilaku masyarakat, membuat permohonan untuk bersikap toleransi, memberikan inspirasi melakukan tindakan politik, dan sebagainya. Tujuan seorang pengarang ini memang memungkinkan tidak dapat langsung “berbicara” dengan orang yang hati nuraninya ingin disentuh. Dia mengungkapkan suatu kenyataan tertentu, visi pribadi, dan pembaca sebagai *pengamat* kenyataan ini, tetapi penulis tidak mengarahkannya untuk bertindak.

OS-MJN sebagai naskah drama, pengaruhnya tidak dapat diukur menurut tindakan yang ditimbulkan: “suatu pamflet politik atau risalah keagamaan akan gagal jika tidak dapat mengilhami pembaca untuk berperilaku tertentu.” Dengan demikian, keberhasilan karya sastra sama sekali tidak bergantung pada aktivitas yang timbul akibat membaca karya tadi. Shelley mengatakan:

“Penulis sastra adalah penguasa dunia yang tidak diakui, bukanlah penguasa: penulis sastra tidak membuat undang-undang meskipun secara tidak langsung mereka dapat mempengaruhi orang-orang yang membuat undang-undang.” (Widdowson, 1997: 63).

Dengan demikian, bahwa hakekat komunikasi dalam karya sastra tidak hanya dihubungkan dengan konteks sosial secara langsung. Diskursus sastra tidak bergantung pada instruksi biasa, dan tidak mempunyai hubungan dengan diskursus yang sebelumnya, dan tidak mengantisipasi aktivitas berikutnya baik verbal maupun tidak. Penafsirannya tidak tergantung pada letaknya dalam konteks situasi ataupun pada peran pengirim atau peran pembaca secara internal sebagai penerima. Hal ini menunjukkan adanya kesatuan lengkap yang dapat ditafsirkan sebagai unit

komunikasi yang lengkap dan terpisahkan langsung dari kenyataan kehidupan sosial. Dengan demikian, abstraksi berupa pemaknaan terhadap naskah OS-MJN yang kedua ini diperlukan sebagai fungsi “men-universal-kan” pemaknaan.

#### 4.1 Konsep Penguasaan

Dalam pemaknaan pertama, yakni pemaknaan *denotatum* naskah OS-MJN terhadap *ground*-nya diperoleh satu hal yang faktual, yakni budaya politik yang dianut di Indonesia secara dominan dipengaruhi oleh budaya politik yang dibangun dari struktur sosial yang sangat hierarkis. Di antara strata yang ada dikenal pemilahan antara *wong gedhe* dan *wong cilik* yang memiliki toleransi rendah terhadap perbedaan pendapat, perbedaan pandangan dan sikap. Hal ini mengakibatkan kecenderungan tidak mengenal oposisi karena dianggap akan mengakibatkan lahirnya konflik yang mengganggu stabilitas nasional.

Fakta dalam kasus tekstual naskah OS-MJN yang diacu adalah terdapatnya penggolongan dua komunitas Warda. Warda yang tinggal di pemukiman elite merelasikan *wong gedhe*, dan Warda yang tinggal di pemukiman kumuh adalah *wong cilik*. Kontras terhadap fakta yang demikian, dengan berbagai fenomenanya, baik secara tekstual maupun kontekstualnya adalah sebagai bukti rekayasa yang dibuat penguasa.

*Interpretant* yang mengacu pada peristiwa tersebut memberikan *argument* berupa konsekuensi dari perilaku-perilaku itu, dalam sebuah konsep “penguasa sebagai pelindung”. Sunardian Wiradono (1995: 12) menjelaskan konsep tersebut,

bahwa menunjukkan kalangan penguasa selalu menempatkan diri sebagai pelindung dan pengayom rakyat yang murah hati, yang bercitra baik hati (*benevolensi*). Penguasa selalu memiliki persepsi bahwa dialah yang paling tahu aspirasi masyarakatnya. Rakyat identik dengan *kawula* yang musti patuh, tunduk, dan setia. Hal ini dapat ditunjukkan dalam sikap arogansi Dr. Salim karena kedudukannya, seperti dalam kutipan berikut:

DR. SALIM: Intinya, saya tetap buka praktek karena masyarakat, saya yakin, masih tetap membutuhkan saya. Lebih-lebih lagi, karena tenaga di bidang ini memang masih boleh dibilang langka. Dan regenerasi, dengan sedih harus diakui, berjalan sangat alot. Macet, begitu. Maka, dengan penuh cinta dan pengabdian, saya masih tetap duduk di pos saya ini, mendampingi para dokter generasi muda, menjaga kesehatan tubuh Dan jiwa masyarakat yang membutuhkan. (OS-MJN: 16)

Dari kutipan tersebut seakan-akan menunjukkan bahwa sikap egoistis Dr. Salim atas jasa-jasa yang dilakukan olehnya. Dr. Salim yang menempatkan diri sebagai penguasa sekaligus penyelamat kesehatan masyarakat merupakan wujud *benevolensi*. Hal ini menafikan dirinya sebagai dokter yang sudah kewajibannya menyembuhkan sakit pasien, karena memang dia mendapat bayar dari pasiennya. Karena situasi seperti itu, Dr. Salim tidak mengerti bila pasiennya melakukan protes terhadap sikapnya. Cara berpikir semacam itu sesungguhnya dominan di kalangan para pemimpin. Hal ini membuat makin rendahnya toleransi terhadap kritik atau perbedaan pendapat, sikap dan cara pandang. Kebenaran mutlak kemudian menjadi hak tunggal penguasa, yakni Dr. Salim. Mereka yang melakukan koreksi terhadapnya

dikatakannya tidak mengenal tata cara dan sistem nilai yang dikenal. Mereka justru dikatakan sangat menentangnya, serta dianggap meracuni masyarakat dengan paham-paham yang salah. Politik dalam budaya politik tersebut menurut Wirodono (1995: 13) dikenal sebagai *zero sum game*, yang menempatkan penilaian oposan sebagai musuhnya. *Interpretant* sikap Dr. Salim sebagai *zero sum game* ini dapat diperhatikan dalam kutipan berikut:

DR. SALIM: ...Prek omongan orang, yang iri dan dengki itu, yang cnak saja bilang: Profesor doktor Salim itu sudah patut pensiun, untuk apa masih bersusah-susah meladeni menyuntik pasien-pasien? Lebih cnak tinggal di rumah bersama anak cucu, menonton telenovela atau srimulat di TV. Seminggu sekali ke kebun binatang atau piknik ke gunung. Prek. Lho, bagaimana? Para pasien masih antri mencari saya, masa ditinggal? Tidak etis. Tidak etis. Begitulah saya. (OS-MJN: 17).

Dalam teks *ground*-nya ditunjukkan bahwa peristiwa tersebut menunjukkan ketidaksediaan Dr. Salim mundur sebagai pimpinan klinik, karena dia sudah merasa banyak berjasa terhadap masyarakat dan kliniknya. Dengan demikian dia seakan-akan menjadi penguasa tunggal yang otoriter. *Denotatum* yang didapatkan adalah ketidakmauan Soeharto mundur dari jabatan kepresidenan karena merasa telah mampu membangun bangsa dan negara juga menyejahterakan masyarakat.

Sebagai konsekuensi atas sikap Dr. Salim sebagai *ground* ataupun Soeharto sebagai *denotatum*, penggantian terhadap kedudukannya tidak menjadi hak obyek, tetapi hanya menjadi hak kalangan tertentu atau relasi dekat subyek, dengan sistem nilai elitokrasinya, dan bukan demokrasi. Hal ini tampak pada pemilihan Dr. Salim

terhadap Dr. Adi atau pemilihan Soeharto terhadap Habibie untuk menggantikan kedudukannya. Pemilihan Dr. Adi atau Habibie hanya didasarkan pada relasi dekatnya, atau “tangan kanannya” yang pada suatu ketika bisa dia dikte.

Para Warda sebagai *ground* para pasiennya atau sebagai *denotatum* rakyat pada konteks masyarakat Orde Baru hanya menjadi penonton pasif atas pengambilan pimpinan yang sesungguhnya tidak memberi perubahan apapun. Hal ini dikarenakan seperti yang disampaikan mantan Mensesneg Moerdiono (*Kompas*, 10 Desember 1994), bahwa sikap pasif para pasien dalam naskah OS-MJN, atau rakyat dalam konteks sosialnya, karena penguasa menerapkan bahasa kekuasaannya sebagai berikut:

“Melalui hukum kekuasaan kita diubah menjadi wibawa. Sengketa dan konflik kita ubah menjadi kasus. Kultus individu kita ganti dengan kepemimpinan yang melembaga. Kemajemukan kita tata dan daya gunakan sebagai kekuatan.”

Fakta teks yang terdapat dalam naskah OS-MJN relasinya dengan fakta konsep kekuasaan semacam itu antara lain: ketika seorang juru bicara mengumumkan musibah nasional berupa wabah sembelit. Untuk menghilangkan ekses-ekses yang sifatnya pengayom politis yang dianggap golongan ekstrim, sedangkan pernyataan itu hanyalah fiktif, maka dibentuklah suatu lembaga untuk menangani wabah tersebut berupa komite atau dewan nasional. Tugas komite ini adalah untuk memantau, mendata, serta menemukan sistem pencegahan terpadu yang ampuh, agar wabah sembelit tidak sampai berlarut-larut. Sebagai konsekuensi atas pembentukan komite tersebut, secara politis relasional sekaligus

melanggengkan kekuasaan, maka dipilahlah Dr. Salim sebagai pimpinan. Pemilihan Dr. Salim sebagai pimpinan ini pun didasarkan karena pensakralan dan pengkultusan atas dia sebagai senioritas. Selain itu, juga karena Dr. Salim dianggap satu-satunya dokter yang mampu mengatasi wabah sembelit tersebut, karena jasa-jasanya di masa lalu. Anggapan lain atas pemilihan Dr. Salim adalah penghindaran terhadap pecah belahnya kesatuan dan persatuan, dan untuk menjaga stabilitas nasional (OS-MJN: 88-90).

#### 4.2 Konsep Hegemoni

Kelanjutan logis dari konsep penguasaan adalah konsep hegemoni dalam arti yang luas, yakni bukan hanya pada tataran hegemoni dalam negara. Hegemoni di sini diartikan sebagai kediktatoran yang terjadi dalam masyarakat, seperti halnya konsepnya Lenin tentang fenomena keunggulan kelas borjuasi dalam sistem sosial yang stabil. Sebagai dukungan atas pendapat hegemoninya Lenin, Gramsci mendukung realisasi hegemoni yang secara spesifik digunakan untuk menyebut tingkatan kepemimpinan intelektual dan moral, serta dominasi politik (Patria dan Arief, 1999: 122). Dalam hal ini dapat dilihat bahwa hegemoni dapat berarti suatu kepemimpinan moral dan dominasi sekaligus.

Dalam naskah OS-MJN, konsep hegemoni ini kental sekali diperlihatkan melalui *ground* dalam praktik kepemimpinan Dr. Salim dalam dunia kedokteran. Dr. Salim adalah sosok yang diktator dalam mengaplikasikan praktik kedokteran. Diibaratkan dalam naskah, bahwa praktik Dr. Salim menggunakan kendali

kekuasaan seperti dalam militer. Dominasi seorang pimpinan, yakni Dr. Salim, terhadap anak buahnya sangat kentara sekali. Dr. Adi, Dr. Rita, dan Suster Herati yang berlaku sebagai staf kepemimpinan Dr. Salim dipaksa tunduk atas segala perintah, meskipun perintah itu terkadang salah. Koreksi terhadap kepemimpinan Dr. Salim sama sekali tidak berlaku.

Dominasi kepemimpinan Dr. Salim juga tidak terjadi hanya pada stafnya, tetapi juga pada pasiennya. Hal ini dapat dilihat dominasi Dr. Salim dalam memberikan pidato penjelasan penyakit Warda terhadap istrinya, Siti Rugata. Siti Rugata sama sekali tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga suaminya tertidur (OS-MJN: 53-56).

Konteks *denotatum* yang didapatkan adalah bentuk kepemimpinan Soeharto yang sakral, otonom, dan otoriter sehingga stafnya adalah bagian dari keotoriteran Soeharto. Sebagai bukti dari sifat kepemimpinan itu adalah terbungkamnya oposisi. Tokoh-tokoh yang dianggap berseberangan disingkirkan sehingga yang muncul adalah doktrin-doktrin pemaksaan kehendak pada keputusan satu orang. Sebagai akibat dari sikap itu adalah demokrasi benar-benar tidak berlaku semasa Orde Baru.

*Interpretant* dari *denotatum* tersebut adalah berupa kenyataan tentang dominasi sebagai modal yang esensial dari hegemoni. Dasar dari hegemoni Gramsci (dalam Patria 1999: 233) adalah hukum dan proses pelegalan. Negara Orde Baru sebagaimana yang tergambar dalam naskah OS-MJN melalui tokoh Dr. Salim, membuat justifikasi atas praktik prerogatifnya berdasarkan atas hukum. Kekuasaan Dr. Salim secara konsisten meraih legitimasi atas proses konstitusional dan proses



parlemen. Proses legitimasi ini dilakukan dengan cara “bergandengan tangan” dengan praktik kekuasaan *draconian* (penanganan pasien dengan sewenang-wenang, hukuman mati dengan ringan tangan, penyiksaan dan sensor) yang dengan seksama dijalankan demi konstitusi nasional dan proses peradilan untuk menghasilkan kontrol sosial dengan tujuan pengelolaan suksesi yang ketat. Hal ini dibuktikan dari *ground*: pemotongan yang semena-mena terhadap para Warda saat pembedahan cesar. Pembedahan ini hanya dilakukan untuk menentramkan para Warda yang terserang sembelit. Padahal pemotongan itu dilakukan tidak memberi penyembuhan, tetapi memperparah keadaan (OS-MJN: 88-89). Hegemoni juga berarti proses kontrol atas parlemen, yakni seluruh staf Dr. Salim dibawah kontrol pribadi Dr. Salim, yakni dengan memberikan intervensi yang penuh terhadap para stafnya dan juga pengganti kepemimpinannya (OS-MJN: 106-108). Selain itu, hegemoni juga berarti pembatasan yang keras terhadap aktivitas politik massa dan peradilan publik untuk para pembangkang, yakni ketika penghancuran komunitas para Warda oleh militer yang menjadi “tangan kanan” Dr. Salim. Padahal motivasi untuk menghancurkan komunitas itu tidak memiliki landasan yang proposional, yakni hanya memperkarakan teriakan sembelit para Warda (OS-MJN: 84-87). Dengan demikian, legalitas menjadi “pelayan normalisasi kekuasaan” dalam interaksi antar sistem kekuasaan dan masyarakat. Proses legal jadi pelayan kendala fisik, dan secara simultan mendelegitimasi serta menyepak para pembangkang ke pinggir.

Dalam *interpretant*: praktik kekuasaan *draconian*, masyarakat menjadi bergantung pada penguasa. Dalam konteks naskah OS-MJN, para Warda menjadi

bergantung pada Dr. Salim. Akibat dari kebergantungan para Warda yang diimplementasikan sebagai rakyat, dengan merujuk pada konsep tentang situasi sosial oleh Gramsci (melalui Nezar Patria, 1999: 121), dalam terminologinya tentang “momen”, yakni filsafat dan praktik sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang: dominasi merupakan konsep dari realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah lembaga dan manifestasi perscorangan. Pengaruh dari “roh” ini membentuk hegemoni selalu berhubungan dengan penyusunan kekuatan sebagai kelas diktator.

Ada tiga tingkatan hegemoni yang dikemukakan Gramsci, yaitu hegemoni total (*integral*), hegemoni merosot (*decadent*), dan hegemoni minimum (Patria dan Arief, 1999: 128). Berhubungan dengan konteks politik Orde Baru dalam naskah OS-MJN, tingkat hegemoni satu dan dua sangat berkorelasi. Pada awal masa Orde Baru, hegemoni yang terjadi adalah hegemoni merosot (*decadent hegemony*). Dalam posisi hegemoni semacam ini, dominasi ekonomis swasta menunjukkan adanya potensi disintegrasi. Disintegrasi ini tampak dalam konflik yang tersembunyi “di bawah permukaan kenyataan sosial”, yakni sekalipun sistem yang ada telah mencapai kebutuhan atau sasarannya, tetapi “mentalitas” massa tidak sungguh-sungguh selaras dengan pemikiran yang dominan dari subyek hegemoni. Akibat dari itu, integrasi budaya maupun politik menjadi mudah runtuh. *Interpretant* dan *denotatum* dari kenyataan tersebut dari *ground* tekstual yang dapat diamati melalui keluhan para usahawan (para Warda di pemukiman elite) atas situasi usaha mereka. Seperti dalam kutipan berikut:

WARDA: (KOOR)

Harta karun di dalam negeri  
 Deposito di luar negeri  
 Harta bergerak, harta diam  
 Simpan, pendam dalam-dalam  
 Masa depan bisnis makin suram

SDM. (S)clamatkan (D)iri (M)asing-masing  
 Buat apa pusingkan orang lain  
 Lebih baik cinta diri sendiri  
 Jual semua, bangkrutkan usaha  
 Lalu menangislah seperti biasa... (OS-MJN: 41)

Dalam konteks tersebut, menunjukkan bahwa klas pengusaha (para Warda di pemukiman elite) yang notabene tidak mengalami kesulitan ekonomi enggan melanjutkan usahanya. Kecanggungan ini diakibatkan karena sistem politik-ekonomi yang diterapkan oleh kelompok hegemonis tidak sehat, yakni berupa manipulasi tinja palsu untuk keperluan pembedahan para Warda, atau dalam konteks *denotatum*-nya berupa penyingkiran oposisi. Disebutkan pula dalam *ground* teksnya, maupun *denotatum* konteksnya bahwa mereka tetap merupakan “kambing-kambing hitam” kelompok hegemonis. Hal ini, karena sesungguhnya kelompok hegemonis yang seharusnya hanya mengatur kebijakan juga berkompetisi dengan para pengusaha. Akibat tidak sehatnya penerapan sistem politik-ekonomi yang dikembangkan kelompok hegemonis ini, usaha para Warda pun kandas tanpa hasil, seperti terlihat dalam kutipan berikut:

WARDA 4: Menghitung apa? Menghitung apa?

WARDA: (KOOR) Fasilitas tanpa batas  
 Tender modal nol  
 Libur pajak maksimal  
 Persaingan global  
 Kredit bunga tinggi

Agunan manipulasi  
Kurs valas melambung  
Ekonomi limbung... (OS-MJN: 37)

Peristiwa resesi ekonomi yang dialami dalam naskah OS-MJN tersebut sama halnya ketika pemerintah Orde Baru terkena krisis ekonomi. Hal inilah yang dikatakan dalam *interpretasi-nya decadent hegemony*, yakni seakan-akan para pengusaha swasta mengalami kesuksesan besar, tetapi setelah ditinjau lebih jauh mereka bobrok di dalamnya. Hal ini dibuktikan dengan hancurnya mereka ketika dilanda krisis ekonomi.

Hegemoni minimum (*minimal hegemony*), merupakan hegemoni yang bersandar pada kesatuan ideologis antara kelompok-kelompok masyarakat yang berlangsung bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam setiap hidup masyarakat. Dengan demikian, kelompok hegemonis tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasi-aspirasi mereka dengan kelas lain dalam masyarakat. Hegemoni yang terjadi akibatnya merupakan penyatuan terhadap kelompok-kelompok sosial tersebut dengan cara transformasi aturan-aturan pada masing-masing kelompok yang secara potensial bertentangan dengan “masyarakat baru” yang dicita-ditakan oleh kelompok hegemonis itu (Patria dan Ariel, 1999: 128).

Konsep hegemoni yang kedua ini dalam konteks *denotatum-nya* sama artinya dengan penentangan terhadap perbedaan pendapat atau dimampatkannya oposisi. Tujuan hegemoni semacam ini selalu berkedok “demi persatuan dan kesatuan” dan menjaga stabilitas politik. Perbedaan pendapat dianggap sebagai

pemberontakan. Hal ini diindekskan melalui *ground* para Warda ketika tidak mendapat kebebasan mengeluarkan tinja alias sembelit. Buang air besar sebagai proses pembebasan, tiba-tiba dimacetkan tanpa tahu apa sebabnya. Keluhan terhadap sakit itu, mereka berteriak tertahan akibat tinjanya tidak mau keluar. Sikap mereka yang meneriakkan rasa sakit itu justru ditanggapi oleh penguasa, melalui tim keamanan, sebagai pemberontakan. Hal ini dapat dilihat dalam kutipan berikut:

**KOMANDAN: (MERAH)**

Kalau begitu, kalian sama sekali tidak menghargai himbauan saya, keramahtamahan saya. Baik, kalau memang begitu maunya. Kalian harus ikut saya ke markas. Jangan ada bantahan lagi. Habis sabar saya. Diajak dengan cara bersahabat tidak mau. Terpaksa pakai cara keras. Di markas, kalian boleh bicara. Ayo. Jalan! Angkut mereka semua. Jalan! Ini sudah bisa digolongkan sebagai demonstrasi. Pamer kekuatan solidaritas. Jalan! (OS-MJN: 86-87)

Kutipan tersebut jelas menunjukkan suatu totalitas yang didukung oleh kesatuan dua konsep: kekerasan dan dominasi. Dominasi dan kekerasan terhadap para Warda menyiratkan adanya dominasi terhadap para Warda sebagai masyarakat yang dianggap musuh, dan kekerasan itu karena dilakukan oleh segenap sekutu-sekutunya Dr. Salim.

Kekerasan merupakan *argument* dari suatu pra-kondisi untuk menaklukkan masyarakat atau para Warda dalam melegalisasikan dan melanggengkan kedudukan Dr. Salim. Dengan berbagai levelnya, dengan mengacu pada teori Gramsci (dalam Patria dan Aricf, 1999: 118), terdapat “perspektif ganda” dalam penguasaan. Perspektif ganda tersebut antara lain:

- 1) *Tentang kekuatan dan persetujuan*, yakni berdasarkan *ground* tindakan penangkapan para Warda dengan cara kekerasan oleh tim keamanan sebagai upaya pemaksaan kehendak terhadap mereka agar setuju dengan kehendak kelompok Dr. Salim atau berdasarkan *denotatum* penyingkiran tokoh yang dianggap berseberangan terhadap penguasa semasa Orde Baru.
- 2) *Tentang kewenangan dan hegemoni*, yakni berdasarkan *ground* segala kekerasan yang dilakukan tim keamanan terhadap para Warda adalah sah dengan alasan menjaga stabilitas, padahal usaha semacam itu merupakan kedok untuk mempertahankan hegemoni kedudukan Dr. Salim atau berdasarkan *denotatum* penindakan dengan cara kekerasan oleh militer setiap aksi unjuk rasa atau kritik semasa Orde Baru.
- 3) *Tentang kekerasan dan peradaban*, yakni berdasarkan *ground* apapun yang dilakukan terhadap para Warda di pemukiman kumuh oleh tim keamanan tetap dinamakan kekerasan, tetapi di sisi lain kekerasan ini dianggap sebagai dimensi untuk mempertahankan peradaban atau stabilitas, demikian pula dalam konteks *denotatum* yang menutupi kekerasan militer terhadap para demonstran berkedok untuk menjaga ketertiban.
- 4) *Tentang momen pribadi dan momen universal*, yakni berdasarkan *ground* sistem penyelamatan terhadap para Warda yang diterapkan oleh Dr. Salim adalah untuk kepentingan pribadi, yakni menumpuk popularitas dan kekayaan. Meskipun demikian, Dr. Salim dalam menggapai usahanya selalu menggunakan “tirai” demi “kepentingan kita semua” atau “demi keselamatan para Warda”.

Berdasarkan konteks *denotatum*-nya, Soeharto mengambil kata “pembangunan” dalam membuka suatu usaha besar, seperti yayasan sosial atau badan sosial lain, tetapi terbukti tindakan tersebut adalah tindakan manipulatif untuk menumpuk kekayaan pribadi.

Sebagai konsekuensinya, tetap mengacu pada interpretasi Gramsci (dalam Patria dan Arief, 1999: 120), kecenderungan Dr. Salim dalam melayani dan mengakomodir para Warda dikuasai dan dipimpinnya dengan jalan tirani. Hal ini menunjukkan adanya keharusan, dalam sebuah formasi sosial, hegemoni akan dihadapkan pada tarik menarik antara dua kelompok sosial, yakni *ground* pertentangan antara Dr. Salim dan para Warda dan *denotatum* tarik menarik antara penguasa Orde Baru dengan oposan. Kelompok Dr. Salim dalam konteks tersebut pasti memiliki keinginan untuk mendominasi pasiennya: menentukan apa sesungguhnya penyakit yang diderita pasiennya, bagaimana cara penyembuhan, dan berapa biaya yang harus ditanggung pasiennya; atau dalam konteks Orde Baru: penguasa selalu memberi undang-undang baru setiap kali ada yang berusaha menentang kekuasaan.. Dengan demikian, diperoleh pengertian, bahwa hegemoni pada hakekatnya adalah upaya untuk menggiring orang agar menilai dan memandang problematika sosial dalam kerangka yang sudah ditentukan.

### 4.3 Tentang Rekayasa Sosial

Dalam subbab 3.4 yang membahas tentang tema sudah diungkapkan tentang adanya realitas sosial baru yang menyangkut reformasi dalam konteks Orde Baru. Di

dalam naskah OS-MJN menyiratkan suatu angin reformasi yang saat ini bertiup. Dengan mengenyampingkan apakah reformasi itu berhasil atau tidak, konteks tersebut memberikan momentum baru bagi rekayasa sosial yang berkait dengan fakta teks naskah OS-MJN. Istilah rekayasa sosial dalam masyarakat kecenderungannya selalu membawa pada *image* negatif, akibat kegiatan-kegiatan praktis rekayasa yang dilakukan oleh kelompok elite masyarakat tertentu.

Dengan mengenyampingkan apakah rekayasa sosial itu memiliki nilai negatif atau positif, yang jelas suatu rekayasa sosial masyarakat mempunyai tujuan untuk mengatasi berbagai macam *social problems*: dengan membangkitkan sebab-sebab efisien perubahan yang dapat merombak tatanan dan institusi-institusi sosial. Dengan demikian, menghasilkan suatu masyarakat yang mandiri, *responsible*, terbuka, yang di dalamnya rantai lingkaran setan berbagai permasalahan sosial berhasil diputuskan.

Persoalan yang diacu *interpretant* tersebut adalah berupa *ground* “sembelit” dengan berbagai eksesnya. Sembelit yang telah menjadi wabah nasional menjadi *social problems* para tokohnya sehingga harus ada penyelesaiannya. Dr. Salim sebagai satu-satunya tokoh yang dianggap masih bisa dipercaya, dengan berkedok menolong demi darma baktinya pada bangsa dan negara, berniat mengatasi persoalan sosial yang sudah mewabah itu. Demi popularitas, keuntungan pribadi, dan mempertahankan kedudukan, maka Dr. Salim merekayasa segala sesuatunya. Sebagai contoh: dia membuat tinja palsu untuk membohongi pasiennya. Akibatnya, problem yang seharusnya diartikan sebagai tindakan kolektif untuk memecahkan masalah



sosial, menjadi tindakan pribadi, dan untuk kepentingan individual. Seperti halnya yang dijelaskan dalam konteks *denotatum*-nya: bahwa Orde Baru selalu membawa kata-kata “pembangunan” dalam konteks kenegaraan. Sebagai akibatnya memberikan *image* bahwa penguasa adalah kelompok yang sangat berjasa terhadap rakyat, sakral, dan tidak boleh ditentang. Sementara setelah ada pembuktian yang lebih konkrit mereka telah melakukan manipulasi politik yang menguntungkan pribadi mereka sendiri. Akhirnya mereka diberi label penguasa yang korupsi, kolusi, dan nepotisme (Rakhmat, 1999: 73).

Dari sikap Dr. Salim tersebut, menimbulkan krisis emosional dan stres mental. Hal ini diakibatkan karena dalam melakukan rekayasa sosial terjadi disintegrasi sosial dan disintegrasi individual. Disintegrasi individual sendiri akibat dari disintegrasi sosial, karena proses perubahan yang tidak seimbang. Perubahan yang tidak seimbang ini terjadi ketika para Warda yang hidup di pemukiman kumuh berkehendak kesembuhan atas sembelitnya, tetapi ditanggapi sebagai pemberontakan. Padahal semua itu terjadi karena mereka tidak sanggup membayar ongkos operasi cesar seperti yang dilakukan oleh para Warda yang hidup di pemukiman elite. Akhirnya para Warda terpuruk dalam sakitnya, hanya bisa mencriakkan rasa sakitnya yang ditanggapi sebagai pemberontakan. *Interpretant* dari Kenyataan sosial semacam ini dalam pengertian Jalaluddin Rakhmat (1999: 25) diartikan sebagai *mitos trauma*. *Mitos trauma* ini dapat disinyalir dalam nyanyian Lukana tentang keputusasaannya melihat problema sosial yang begitu kompleks, tetapi penguasa seakan-akan tidak mau tahu terhadap penderitaan mereka. Situasi yang sangat tragis, karena nyali para

Warda yang sudah dipotong oleh Dr. Salim sehingga gerakan mereka seakan-akan menjadi terbatas seperti terkurung dalam peti mati: tanpa cahaya dan udara yang bersih. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan berikut:

(KISAH LUKANA, SI GILA, DAN WARDA-WARDA DI KAWASAN KUMUH)

LUKANA: (MENYANYI)

Cuma semut-semut dan kutu  
yang sanggup menyelinap  
ke balik pintu tertutup  
Sedang kita cuma mampu  
menunggu hingga pintu terbuka  
Dan takut mendobraknya  
Terkurung dalam peti mati  
Sedikit udara bersih  
Bahkan cahaya pun pergi  
Perubahan harus terjadi  
Sebab kita tak sendiri  
Tapi, mengapa tak ada nyali?... (OS-MJN: 64)

Situasi dalam *ground* tersebut melalui William F. Ogburn (melalui Rakhmat, 1999: 26) menyebut kasus tersebut sebagai *cultural lag* dalam artinya yang luas. *Cultural lag* ini terjadi bila satu dari dua jalinan kebudayaan mengalami perubahan sebelum atau dalam derajat yang lebih besar ketimbang yang terjadi pada yang lain sehingga mengurangi persesuaian (*adjustment*) yang telah ada di antara keduanya. Situasi tersebut dapat berdampak "krisis".

"Krisis" dapat dilihat pada *ground* reaksi para Warda yang belum siap menghadapi perubahan atas perubahan kesehatan mereka berupa "sembelit" yang berkepanjangan. Akhirnya para Warda berusaha melakukan mekanisme pertahanan untuk menghadapi trauma perubahan sosial. Dalam konteks *denotatum*-nya: ketika Orde Baru dilanda krisis berkepanjangan maka rakyat pun khawatir akan terjadi

kekacauan sosial yang memberi dampak pada kehidupan mereka. Akhirnya yang muncul adalah “krisis kepercayaan” atas terjadinya krisis ekonomi, dan memunculkan protes di sana sini.

Dengan mengacu pada analisis Ogburn dan Nimkoff (melalui Rakhmat, 1999: 26), yakni analisis korelasional antara perubahan sosial dan peningkatan penyakit jiwa. Dalam analisis tersebut dibuktikan, bahwa ketika masyarakat berubah dengan cepat, jumlah penderita penyakit jiwa bertambah, karena mengalami suasana traumatik. Hal ini dapat dilihat melalui *ground* ketika penyakit sembelit hanya diderita oleh Warda sebagai individu, berubah menjadi wabah sembelit yang diderita oleh semua tokohnya, atau dalam konteks *denotatum*-nya adalah penyebaran krisis kepercayaan terhadap penguasa yang menjadi mobilisasi utama protes massa.

Wabah sembelit yang diartikan sebagai *social problems* dan memberi eksese pada perubahan sosial, secara otomatis akan memerlukan pelaku perubahan sosial (*change agency*). Siapapun yang menjadi pelaku perubahan sosial, tentunya menggunakan taktik untuk mempengaruhi sasaran perubahan (Rakhmat, 1999: 89). Ada beberapa strategi alternatif dalam melakukan perubahan. Dalam konteks *ground* imajiner naskah OS-MJN, strategi perubahan ini dijalankan dengan cara memaksa. Cara memaksa ini yakni dengan menggunakan kekuasaan (*power strategy*), yakni suatu upaya yang dapat menimbulkan kepasrahan behavioral atau kerjasama pada sasaran perubahan melalui penggunaan sanksi yang dikendalikan oleh agen. Tindakan dengan *power strategy* ini dalam *ground*-nya diterapkan oleh Dr. Salim dalam praktik penyembuhan para pasiennya, sedangkan dalam *denotatum*-nya berupa

tindakan anarkhi militer untuk mengatasi *social problem*. Pasiennya dipaksa untuk mengikuti prosedur penyembuhan yang dimonopoli oleh Dr. Salim melalui lembaga Kompasnas (Komite Pengendali Epidemi Nasional) (OS-MJN: 88-90). Selain itu, Dr. Salim “memaksa” pasiennya untuk datang padanya menggunakan orang-orang yang punya otoritas melalui staf bawahannya, seperti: Dr. Adi, Dr. Rita, dan Suster Herati. Selain menggunakan tokoh yang punya otoritas, Dr. Salim menggunakan paksaan (*force*) berupa kekuasaan, ancaman, atau gangguan melalui tim keamanan yang berada di bawah kendalinya. Dari bentuk-bentuk tersebut, *interpretant* tentang rekayasa sosial negatif dalam naskah OS-MJN diterapkan.

#### 4.4 Evolusi Sosial yang Gagal

Evolusi sosial di sini diartikan sebagai perubahan masyarakat dalam sejarah. Evolusi sosial adalah sesuatu hal yang wajar dan hampir selalu terjadi dalam masyarakat. Tokoh yang pertama kali mengungkap evolusi sosial adalah Karl Marx. Evolusi sosial atau perubahan masyarakat menurut Karl Marx (melalui Suseno, 1999: 145-146), merupakan akibat dinamikan dalam basis dan bukan “bangunan dari atas”. Bangunan atas yang dimaksudkan Karl Marx adalah negara. Menurutnya pula, negara dalam proses evolusi sosial tidak bisa berperan sebagai *agent of change*, karena negara hanyalah menjadi pendukung kekuasaan para pemilik modal.

Teori evolusi Karl Marx mendapat kritik tambahan oleh Jurgen Habermas. Jurgen Habermas memperluas pengertiannya (melalui Hardiman, 1993: 116), bahwa evolusi sosial bukan hanya pada prinsip materialisme, yakni prinsip yang mengacu

pada sistem produksi masyarakat atau kapitalisme. Kapitalisme hanyalah sebagian kecil dari proses evolusi sosial, dan kapitalisme tidak bisa dikontekstualkan secara universal.

Pada prinsipnya, *interpretant* berdasarkan prinsip evolusi sosial yang disampaikan Karl Marx dan Jurgen Habermas, merupakan topik utama yang mendasari naskah OS-MJN. Dr. Salim yang diandaikan sebagai penguasa dan para Warda sebagai masyarakat (basis), adalah dua kubu yang saling bertentangan dalam menentukan arah evolusi sosial imajine *ground* naskah OS-MJN. Meskipun demikian, para Warda tetap sebagai pemegang inisiatif perubahan itu karena melihat ketimpangan yang dilakukan oleh Dr. Salim. Selain itu, Dr. Salim tetap berpegang teguh pada prinsipnya dan tetap berusaha memegang kendali kekuasaan. Bahkan, dengan berbagai cara Dr. Salim dalam menghadapi gelombang perubahan yang dikehendaki para Warda, dia menggunakan berbagai cara untuk menghambatnya. Sebagai upaya penghambatan evolusi sosial itu, Dr. Salim mengendalikan para Warda melalui militer dan mengangkat dirinya sendiri sebagai pimpinan KOMPESNAS (Komisi Pencegahan Sembelit Nasional), agar dirinya dijuluki sebagai tokoh pembaharu.

*Interpretant* cara Dr. Salim dalam mengendalikan perubahan sosial tersebut merupakan salah satu tahap evolusioner oleh Habermas yang mendasarkan pada teori psikologi Piaget. Tahap tersebut mendasarkan pada struktur hukum yang “dilembagakan” dan struktur penjelasan moral yang “mengikat” pada peradaban masyarakat awal (Hardiman, 1993: 114). Pengaturan ini adalah pengaturan konflik

dari sudut pandang moralitas konvensional yang terkait dengan figur penguasa, yakni berupa keterikatan para Warda yang harus tunduk terhadap figur Dr. Salim karena diangkat sebagai pimpinan KOMPESNAS. Sedang dalam konteks *denotatum* adalah sempat diangkatnya Soeharto sebagai ketua komisi reformasi. Dalam naskah OS-MJN *interpretant* dan *denotatum* tersebut dapat dilihat dalam kutipan berikut:

**JURU BICARA:** Kami berupaya juga, agar musibah ini tidak ditanggung secara politis oleh golongan ekstrim yang hanya menginginkan daripada kekacauan dan kerusuhan. Kita semua harus prihatin dan tetap waspada.

Kami akan membentuk sebuah komite atau dewan nasional, yang bertugas untuk memantau, mendata, serta menemukan sistem pencegahan terpadu yang ampuh, agar musibah sembelit ini tidak sampai berlarut-larut. Pada saatnya yang tepat akan diumumkan nama-nama pakar yang diangkat menjadi anggota daripada komite atau dean tersebut.

Untuk sementara, selama komite atau dewan belum terbentuk, klinik Dr. Salim diberi wewenang khusus untuk menjalankan tugas posko utama daripada penanggulangan musibah nasional...(OS-MJN: 89)

Dari “pelembagaan” berupa “*dewan*” dan “*komite sembelit nasional*” terhadap tahap-tahap evolusioner oleh Juru Bicara Dr. Salim tersebut akhirnya bukan hanya perkembangan kontrol teknis oleh para Warda, melainkan menjadi proses belajar mereka dalam dimensi praktis-moralnya. Para Warda akhirnya akhirnya harus mengoreksi berbagai kesalahan yang dilakukan oleh Dr. Salim, seperti dalam kutipan berikut:

(POSTER-POSTER PROTES DIGELAR DI LUAR KLINIK. PARA PEMROTES MEMINTA KLINIK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KEKELIRUAN YANG TERJADI. MALAH BANYAK POSTER YANG MEMINTA DR. SALIM DICOPOT DARI KEDUDUKANNYA SEBAGAI KEPALA KLINIK)  
 TERIAKAN: Tuntut Salim! Tuntut Salim! Tuntut Salim!  
 (SEORANG PEMROTES BERPIDATO)

PEMROTES-1: Klinik harus bertanggungjawab atas musibah yang kita tanggung. Ibaratnya, sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah sembeli, cacat pula. Malah ada yang mati. Keluarga kami berantakan. Gara-gara salah obat dan salah penanganan. Klinik harus bertanggungjawab. Jangan mentang-mentang mereka itu dokter, lalu lepas tangan. Tidak bisa. Harus ada tuntutan. Wajib dituntut!(OS-MJN: 90-91)

Tahap-tahap tersebut merupakan tahap belajar, dan mekanisme belajar menurut Habermas, hanya dimungkinkan dalam kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan para tokohnya saling berdialog secara komunikatif (Hardiman, 1993: 115). Perkembangan proses belajar ditunjukkan oleh *ground* oleh para Warda dalam mewujudkan evolusi sosial yang dikehendaki adalah dengan cara menuntut penguasa, yakni Dr. Salim, untuk dicopot dari kedudukannya. Dalam konteks *denotatu-nya*, yakni menuntut Soeharto untuk mundur dari jabatan presidennya. Hal ini sebagai kelanjutan logis dari proses belajar para Warda atau rakyat dalam mengatasi *social problems* dalam dimensi praktis moral yang berfungsi sebagai pembuka jalan bagi perkembangan evolusioner yang dilakukan para Warda, meskipun evolusi itu masih gagal.

# BAB V

## SIMPULAN

